

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- A, Atamimi., & S, Hamid. (1990). *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I–Pelita IV*. Jakarta: Disertasi Ilmu Hukum Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia.
- Ali, Mahrus. (2012). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, Jimly dan M. Ali Safa'at (2006). *Theory Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Asyhadie, Zaeni. (2017). *Aspek-Aspek Hukum Kesehatan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ibrahim, Johnny. (2007). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publisher.
- Komalawati, Veronica. (2002). *Peranan Informed Consent Dalam Transaksi Tereapeutik (Persetujuan Dalam Hubungan Dokter dan Pasien), Suatu Tinjauan Yuridis*. Bandung: PT. Citra Aditya Bhaki.
- Moeloeng, Lexy J. (1996). *Metode Penelitian Kuratif*. Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhadjir, Noeng. (1996). *Metode Penelitian Kualitatif Edisi III*. Yogyakarta: Rake Karasin.
- Muhammad, Abdulkadir. (2010). *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mustofa, Amirul & dkk. (2020). *Administrasi Pelayanan Kesehatan Masyarakat*. Surabaya: CV Jakad Media Publishing.
- Notoatmojo, Soekidjo. (2010). *Etika dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Soemitro, Ronny Hanitijo. (1990). *Metodologi Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sudikno, Mertokusumo. (1998). *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Sunggono, Bambang. (2006). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Syamsuddin, Aziz. (2011). *Proses dan Teknik Penyusunan Undang-Undang*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syamsudin, M. (2007). *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Wujoso, Hari. (2010). *Hukum Kesehatan*. Surakarta: UPT Penerbitan dan Percetakan UNS (UNS Press).
- Sayuna, Inche. (2016). *Harmonisasi dan Sinkronisasi Hukum Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Ditinjau Dari Otentitas Akta Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris* Tesis: Universitas Sebelas Maret. Surakarta

Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Lainnya

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing.
- Peraturan Konsil Kedokteran Nomor 22 Tahun 2014 tentang Persetujuan Alih Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Kedokteran/Kedokteran Gigi

Jurnal

- Susetiyo, W. & Iftitah A. (2021). Peranan dan Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Pelayanan Kesehatan Pasca Berlakunya UU Cipta Kerja. *Jurnal Supremasi*. 11(2). 93
- Haryanto, A. T., & Suranto, J. (2012). Pelayanan Kesehatan (Studi Rawat Inap di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Kecamatan

Baturetno Kabupaten Wonogiri). *Jurnal Transformasi* Vol.XIV No.22, 3.

Mustamu, Julista. (2014). Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah. *Jurnal Sasi* Vol.20 No.2, 22.

Wowor, Hetmi & dkk. (2016). Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Ilmu Sosial & Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan*, 111.

Triwulan, Titik dan Shinta Febrian. (2010). Perlindungan Hukum bagi Pasien. *Prestasi Pustaka*, 48.

Atmadja, Dewa Gede. (2018). Asas-Asas Hukum dalam Sistem Hukum. *Kertha Wicaksana* Vol.12 No.2, 146.

Legowo, Pramono S. (2015). Pengantar Hukum Indonesia. *Bahan Ajar Pengantar Hukum Indonesia Fakultas Hukum UNSOED*.

Internet

Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia.
<https://www.komnasham.go.id>. Diakses 19 Agustus 2023

Pekerjakan Dokter Asing Ilegal, Klinik Kena Sanksi.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/pekerjaan-dokter-asing-ilegal--klinik-kena-sanksi-lt5449fccb667e6/> . Diakses 6 September 2023